

PENDIKOR dan PENDIKAR

Buchory MS

Era reformasi sekarang ini sudah memasuki usia yang ke 14, jika dihitung sejak 21 Mei 1998. Namun demikian salah satu tuntutan reformasi, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ternyata masih jauh panggang dari api. Karena meskipun aparat penegak hukum sudah menyeret beberapa koruptor, namun tindakan korupsi tidak menjadi surut bahkan merajalela di seluruh bumi nusantara. Mental korupsi di negeri ini dapat diibaratkan seperti predikat yang kita berikan kepada ‘pahlawan’, yaitu ditangkap satu tumbuh seribu. Betapa susahnya membasmi korupsi di negeri ini.

Untuk mewujudkan peran sekolah dalam menyiapkan generasi muda agar memiliki kepribadian dan sikap mental anti korupsi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhammad Nuh membuat satu gebrakan baru, yaitu akan diberlakukan pendidikan anti korupsi di sekolah mulai tahun ajaran baru 2012/2013 mendatang. Gebrakan baru ini tidak tanggung-tanggung karena pendidikan anti korupsi, tidak hanya diperuntukkan bagi para peserta didik, tetapi juga bagi guru, dan bahkan kepala sekolah.

Program pendidikan anti korupsi (Pendikor) masuk kurikulum sekolah tersebut ditegaskan oleh Mendikbud sesuai menandatangani naskah kerjasama atau nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu. Kedua pejabat sepakat melakukan kerjasama dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan dan sekolah diharapkan menjadi motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui kebijakan ini, generasi penerus bangsa pada saatnya nanti harus menganggap korupsi menjadi tabu dan tidak mengenal tindakan korupsi lagi.

Pendikor

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang berlangsung sejak awal reformasi, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak karena korupsi merupakan perilaku yang menjadi *konvensi* atau membiasa dilakukan oleh aparatur negara baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tiap hari kita menyaksikan dan membaca berita-berita terkait dengan korupsi yang frekuensinya tidak berkurang tetapi malah bertambah menyedihkan. Bahkan ironisnya berita tentang korupsi tersebut, terkait dengan orang-orang terhormat, seperti anggota DPR, menteri, gubernur dan bupati/walikota baik yang sedang atau selesai menjabat yang tersangkut dengan masalah korupsi. Demikian pula di kalangan swasta juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Bahkan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Kita merasakan betapa sulitnya upaya untuk memberantas korupsi karena sudah menjadi penyakit kronis dan sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa Indonesia ini.

Oleh sebab itu program Pendikor memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan di sekolah karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada peningkatan kemampuan intelektual dan moral serta karakter bagi generasi penerus bangsa ini. Berbagai nilai anti korupsi yang dikembangkan di sekolah adalah : jujur, tanggungjawab, disiplin, adil, sederhana, kerja keras, berani, solidaritas, dan mandiri. Metode yang dapat ditempuh misalnya dengan memperkenalkan tindakan yang termasuk kategori korupsi dengan penyampaian yang menarik, memberi contoh atau teladan perilaku yang bersifat anti korupsi,

melalui kebiasaan melakukan kegiatan yang anti korupsi disertai penguatan, baik berupa *reward* dan *punishment*.

Pendikar

Program pendidikan karakter (Pendikar) sudah lebih dahulu dicanangkan oleh Mendikbud untuk dilaksanakan di sekolah, yaitu sekitar dua tahun yang lalu. Dari sekian banyak nilai karakter yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa kita, ada empat nilai utama yang dikembangkan, yaitu jujur, cerdas, tangguh, dan peduli yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, seperti berikut : nilai-nilai karakter adalah bagian terintegrasi dari semua mata pelajaran dan segala kegiatan di sekolah dan di rumah, bahkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian terintegrasi dari hidup kita; nilai-nilai karakter tidak dapat diajarkan, tapi harus dimunculkan dari dalam diri peserta didik. Adalah suatu kesalahan mengajarkan moralitas, etika, nilai-nilai, karakter dan sejenisnya sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; pengembangan nilai-nilai karakter terpadu memberi kemampuan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah dari berbagai perspektif dengan memberikan pengalaman-pengalaman berbeda yang saling berkaitan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik.

Demikian pula pelaksanaan Pendikar di sekolah sudah barang tentu juga tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi menggunakan pendekatan integratif, yaitu diintegrasikan dengan program Pendikar. Karena pada hakekatnya nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan kepada peserta didik juga merupakan bagian dari nilai-nilai pendidikan karakter. Dengan demikian keberhasilan pendidikan anti korupsi akan mendukung terwujudnya pendidikan karakter, sebaliknya jika pendidikan

karakter berhasil maka bangsa ini akan berhasil menghilangkan sikap mental dan perilaku korupsi dari negeri tercinta yang menjadi dambaan kita bersama. Semoga.

(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah Guru Besar PPKN dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY)).